

Merawat Keteladanan Pemimpin

KATA keteladanan dan pemimpin selalu jadi bahan diskursus yang sering mengandung polemik berkepanjangan menjelang perhelatan demokrasi, terutama sukses kepemimpinan di daerah. Tentu saja ini sangat beralasan mengingat ekspektasi yang teramat tinggi dari masyarakat terhadap pemimpin masa depan, pemimpin yang diharapkan kelak mampu membawa perubahan signifikan dalam seluruh lini kehidupan.

Defisit keteladanan, inilah yang sering terjadi dalam politik kepemimpinan kita. Keteladanan acap kali menjadi ruang kosong dalam diri sang pemimpin. Ritus demokrasi lima tahun nyaris hanya menghasilkan kaum penguasa, bukan negarawan, bukan para pemimpin yang siap berkhidmat untuk masyarakat.

Negeri ini sesungguhnya kehilangan banyak sosok negarawan yang mampu menjadi pemersatu dan perekat. Sosok negarawan bisa menjadi sandaran masyarakat manakala dinamika politik kian panas dan situasi bangsa mengalami keguncangan. Punya ketegakan tulang belulang yang berupa logika tanggung jawab, baik tanggung jawab kita kepada orang lain maupun tanggung jawab orang lain kepada kita.

Benar yang dikatakan WS Rendra, "perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata". Perjuangan adalah bagaimana sum-

pah itu tak menjadi sampah, janji dapat terbukti, visi dan misi mampu diaksentuasikan menjadi bagian dari pengalaman politik harian kebangsaan yang mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan.

Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan yang selama ini menjadi penyumbang kerengangan perlu diakhiri demi persatuan, kesatuan, serta keutuhan bangsa dan negara.

Keteladanan kepemimpinan hendaknya menjadi daya jelajah perubahan dahsyat, menjadi suluh yang menerangi semesta. Tidak terlampaui banyak "cacak" tetapi lupa ber-tindak, terlalu banyak berdiskusi, tetapi alpa menajamkan kepekaan nurani. Meminjam pemikiran sosiolog Imam Prasojo, dikhawatirkan Indonesia lebih banyak memiliki kepemimpinan "kerumunan" daripada kepemimpinan berbasis moral tanpa memiliki rekam jejak yang jelas.

Pidato-pidato keagamaan dan pidato kebangsaan memang penting, tetapi yang lebih penting bagaimana meng-injeksikan kesadaran kepada seseorang, baik dalam konteks keumatan maupun kebang-

saan, untuk melakukan transformasi sosial menuju karya dan tindakan bermakna. Dari ortodoksi ke ortopraksi. Seluruhnya memang bermula dari kata, tetapi kata-kata itu agar memiliki "rajah", menusuk sampai nadi dan sumsum.

Memunyai kaki tangan berupa kerja, karya, dan kenyataan. Oleh karena itu, tugas pemimpin yang utama dan pertama adalah memperbaiki dirinya sendiri. Jika ia sudah menjadi orang yang amanah, adil, jujur, cerdas, dan sanggup mencintai semua, artinya sudah berhasil memperbaiki dirinya sendiri, maka pemimpin itu telah berhasil menjadi teladan, dan akhirnya kepemimpinannya akan berhasil pula.

Ibn Umar RA berkata "saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Mereka bukan hanya tampil di depan dalam urusan dunia, tetapi juga tampil di barisan terdepan dalam urusan agama. Inilah yang sering diistilahkan



Dini Dewi Heniarti

Dosen Pascasarjana
Universitas Islam Bandung

dengan agamawan yang negarawan atau negarawan yang agamawan.

Negeri ini ketika defisit negarawan, maka yang menjamur adalah parpolwan. Penting elite politik yang hanya mengedepankan peraih kekuasaan demi kepentingan kehidupan parpolnya. Strategi dan taktik yang disusun serta dikembangkan ditujukan untuk meraih kekuasaan puncak, jabatan menteri, dan anggota legislatif sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, tidaklah heran agar platform parpolnya mengena di hati rakyat maka pendekatan-pendekatan populis menjadi instrumennya.

Mengurbani lebih menonjol ketimbang berbuat nyata ketika mereka menduduki jabatan politik nantinya. Tidak sebatas pemimpin parpol, para calon kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden pun hendaknya menampilkan diri menjadi sosok anutan. Jika kita tidak merawat keteladanan kepemimpinan, terpaksa kita menengok batu nisan para negarawan. Tahun politik mestinya menjadi momentum emas menjadi diri mereka sebagai tokoh politik sekaligus negarawan. Para pemimpin partai hendaknya menjadi pelopor yang menawarkan politik gagasan dalam setiap kontestasi, bukan mencari kemenangan dengan memainkan politik identitas.

Kepercayaan sebenarnya merupakan keharusan perwu-

judannya dan memiliki aturan-aturan yang baik. Namun dalam fakta sejarah tidak sedikit pemimpin yang menghalalkan segala cara dalam meraih kursi kepemimpinannya. Dunia politik penuh dengan intrik-intrik kotor guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Bertemunya berbagai kepentingan antargolongan, kelompok, dan parpol dalam kalangan elite politik adalah suatu keniscayaan akan terjadinya konflik bila tidak adanya kesepakatan bersama, dan tidak jarang berujung pada penyelesaian dengan jalan kekerasan. Rambu-rambu moral memang sering disebut-sebut sebagai acuan dalam berpolitik secara manusiawi dan beradab. Akan tetapi, hal itu hanya menjadi bagian dari retorika politik.

Berbicara moralitas politik saat ini seolah berteriak di padang pasir yang tandus dan kering. Sementara realitas politik hanya merupakan pertarungan kekuatan dan kepentingan saja. Melalui kecenderungan umum dari tujuan politik yang dibangun bukan dari yang ideal dan tidak tunduk kepada apa yang seharusnya, tetapi menghalalkan segala cara.

Oleh karena itu, diperlukan telah mendalam dan bertanggung jawab tentang etika politik. Keteladanan kepemimpinan diuji dalam momentum emas ini. Jadikan Indonesia ini bukan kerumunan, tetapi barisan-barisan saling bertentang dan bergandeng.***